



**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)  
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP**

---

---

## Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas karunianya, dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan Tahun 2022 dapat kami selesaikan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat rencana kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan di tahun 2022 sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tahun 2021-2026 dan kondisi yang terjadi pada periode perencanaan.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan Tahun 2022 merupakan rencana kinerja tahunan Kepala Daerah terpilih Tahun 2021-2026 dari implementasi Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tabanan 2021-2024. Rencana Kerja menggambarkan target kinerja tahun 2022 sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan sejak awal bertekad untuk membenahi kinerja pemerintahan menuju *good governance*. Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 ini, sehingga segala usul saran yang bermanfaat untuk menyempurnakannya sangat kami harapkan dari segala kalangan.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan Tahun 2022 ini dan kami berharap semoga Rencana Kerja ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Tabanan, 26 Agustus 2022

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip  
Kabupaten Tabanan,



**Dewa Ayu Sri Budharti, SE**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196404221989032012

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja PD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan Tujuan, sasaran dan program Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan PD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022.
3. Renja PD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2022.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun kelima RPJMD Kabupaten Tabanan sebagaimana amanat Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021. Tahun 2021 merupakan tahun Pertama Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tabanan yang berarti diperlukan percepatan proses pelaksanaan pembangunan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan yakni Tabanan Serasi.

## 1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN Tahun 2005-2025);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : Tahun 2008 Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, erta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah No. Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### a. Maksud

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Tabanan ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam PD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

#### b. Tujuan

- Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perpustakaan dan Persip Tahun 2022;
- Menyediakan Sarana Pengendalian Program dan Kegiatan Tahun 2022;
- Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyajian atau penulisan dalam Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan dapat diuraikan sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada BAB ini akan menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum serta maksud dan tujuan daripada penyusunan Rencana Kerja tahunan Perangkat Daerah

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Pada BAB ini memuat kajian revidi terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Prakiraan capaian tahun belanja, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dengan pencapaian target Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan Realisasi Program dan Kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun – tahun sebelumnya

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

BAB ini menjelaskan penelahaan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan, disamping itu juga membuat rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

BAB ini menguraikan pengertian Rencana Program yaitu instrument kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. BAB ini juga berisi Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan indikatif. Penetapan indicator kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan yang mengacu pada tujuan dan sasaran pada bagian dikemukakan indicator kinerja Dinas yag secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

### **BAB V PENUTUP**

BAB ini menjelaskan simpulan menyeluruh dari Rencana Kerja Akhir Tahun Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Tabanan Tahun 2022

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Government*) dan bersih (*Clean Government*) maka perlu diupayakan penyelenggaraan pemerintahan yang terukur melalui penyusunan perencanaan dan pelaporan yang baik dan terukur. Penilaian perencanaan dan pelaporan yang terukur dilaporkan melalui evaluasi rencana kerja.

2.1.1 Berdasarkan pada evaluasi rencana kerja sebagaimana disajikan pada tabel 2.1 terdapat beberapa program dan kegiatan yang secara langsung berpengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

- 1). Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten Tabanan**
  - A). Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - B). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - C). Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - D). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - E). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  
- 2). Program Pembinaan Perpustakaan**
  - A). Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten Kota
  - B). Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten Kota
  - C). Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
  
- 3). Program Pengelolaan Arsip**
  - A). Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten Kota
  - B). Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten Kota
  
- 4). Program Perlindungan Dn Penyelamatan Arsip**
  - A). Pemusnahan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun
  - B). Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana Bersekala Kabupaten Kota

- C). Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten Kota Yang Digabung Dan Atau Dibubarkan Dan Pemekaran Daerah Kecamatan Dan Desa/Kelurahan
- D). Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota Yang Dinyatakan Hilang

Untuk mengetahui uraian program dan kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan tahun 2022 dapat dilihat di tabel di bawah ini :



Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tri Wulan II Tahun 2022

## DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN TABANAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program(re nstra perangkat daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahunn Lalu ( 20201)			Target Program dan Kegiatan ( Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun ( 2021 )	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun ( 2021 )	Tingkat Realisasi ( % )		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 23 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD</b>			100%	77%	77%	100%	71%	71%
2 23 01 2.01	<b>Perencanaan, Panganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Dokumen SAKIP</b>			2 dokumen	94%	94%	3 dokumen	82%	82%
2 23 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP			2 dokumen	92%	92%	2 dokumen	80%	80%
2 23 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP			1 dokume n	96%	96%	1dokumen	86%	86%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program(re nstra perangkat daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahunn Lalu ( 20201)			Target Program dan Kegiatan ( Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun ( 2021 )	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun ( 2021 )	Tingkat Realisasi ( % )		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2	23	01	2.02				WTP 78%	78%	1 tahun	69%	69%			
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN			100%	78%	78%	1 tahun	69%	69%
2	23	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan OPD			2 dokumen	46%	46%	2 dokumen	62%	62%
2	23	01	2.06						80%	64%	64%	1 tahun	45%	45%
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat – alat listrik			100%			1 tahun	0	0

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program(re nstra perangkat daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahunn Lalu ( 2021)			Target Program dan Kegiatan ( Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun ( 2021 )	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun ( 2021 )	Tingkat Realisasi ( % )		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga			100%	18%	18%	1 tahun	0	0
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistic kantor			100%	64%	64%	1 tahun	40%	40%
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan			100%	100%	100%	1 tahun	0	0
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan			100%	99%	99%	1 tahun	0	0
2	23	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan material			100%	50%	50%	1 tahun	7%	7%
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat – rapat koordinasi dan konsultasi			100%	97%	97%	1 tahun	67%	67%
<b>2</b>	<b>23</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terbayarnya jasa penunjang urusan pemerintah daerah			80%	62%	62%	1 tahun		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra perangkat daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahunn Lalu ( 20201)			Target Program dan Kegiatan ( Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun ( 2021 )	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun ( 2021 )	Tingkat Realisasi ( % )		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat			100%	49%	49%	1 tahun	32%	32%
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya telepon, listrik dan air			100%	40%	40%	1 tahun		
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya gaji pegawai kontrak			100%	66%	66%	1 tahun	81%	81%
2	23	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Barang daerah dalam kondisi baik			80%	83%	83%	100%	29%	29%
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan operasional dalam kondisi baik			100%	79%	79%	1 tahun	28%	28%
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan perkantoran dalam kondisi baik			100%	95%	95%	1 tahun	31%	31%



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program(re nstra perangkat daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahunn Lalu ( 20201)			Target Program dan Kegiatan ( Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun ( 2021 )	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun ( 2021 )	Tingkat Realisasi ( % )		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah yang menerima manfaat inklusi social			18 kali	93%	93%	100 orang	12%	12%
2	24	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	Persentase perangkat daerah, swasta, BUMD, dan Desa yang telah mengelola Arsip sesuai NSPK			10 %	83%	83%	25%	46%	46%
2	24	02	2.01		<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase, OPD, BUMD, Swasta dan Ormas yang dibina			10 %	94%	94%	10%	46%	46%
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah OPD,Desa, BUMD, Swasta dan Ormas yang dibina			60%	94%	94%	10%	80%	80%
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD,Desa, BUMD, Swasta dan Ormas yang diawasi						5%	16%	16%
2	24	02	2.02		<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase dokumen /arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan			15%	71%	71%	20%	0	0
2	24	02	2.02	01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah Salinan otentik naskah asli arsip terjaga yang terkumpul			60%	89%	89%	60%	0	0

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra perangkat daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahunn Lalu ( 20201)			Target Program dan Kegiatan ( Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun ( 2021 )	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun ( 2021 )	Tingkat Realisasi ( % )		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
2	24	02	2.02										
				Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang diakuisisi dan dipreservasi			60%	43%	43%	5%	0	0
<b>2</b>	<b>24</b>	<b>03</b>		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	Persentase arsip yang dapat diselamatkan			20%			25%	2%	2%
2	24	03	2.01	<b>Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun</b>	Jumlah arsip OPD yang didata dan dimusnahkan			1 OPD			10 OPD	4%	4%
2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah OPD yang arsipnya dinilai dan ditetapkan untuk dimusnahkan					5 OPD	4%	4%
2	24	03	2.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah arsip OPD yang dimusnahkan					5 OPD	3%	3%





KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program(re nstra perangkat daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahunn Lalu ( 20201)			Target Program dan Kegiatan ( Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun ( 2021 )	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun ( 2021 )	Tingkat Realisasi ( % )		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
2	24	03	2.03	02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang terdata, tersusun dan dimusnahkan akibat pembubaran perangkat daerah				1 OP D	0	0		
2	24	03	2.05		<b>Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang</b>	Persentase arsip statis kabupaten/kota yang diselamatkan			NA			100%	0	0
2	24	03	2.05	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Terdatanya arsip statis yang dinyatakan hilang						2 arsip	0	0
2	24	03	2.05	02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah arsip statis yang dievaluasi dan ditetapkan sebagai hasil alih media yang dinyatakan hilang						2 arsip	0	0
2	24	03	2.05	03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah daftar penetapan dan pengumuman arsip statis yang dinyatakan hilang						2 arsip	0	0

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Urusan perpustakaan dan kearsipan yang menjadi tugas pokok dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan merupakan urusan wajib yang buakn pelayanan dasar, artinya indicator kinerjanya tidak mengacu pada standar pelayanan minimal akan tetapi mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria ( NSPK) atau dengan dengan kata lain dapat dikatakan bahwa indicator kinerjanya mengacu pada pedoman umum, pedoman teknis, petunjuk pelaksanaan atau aturan yang terkait.

Peraturan pemerintah NoMOR 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pada pasal 1 poin 12 menyebutkan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan / atau dampak. Dan sudah tentu kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ini perlu dilakukan evaluasi guna mencapai pemerintahan yang baik dan bersih.

Evaluasi kinerja dilaksanakan melalui Analisa kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan capaian target indicator yang ditetapkan. Adapun indicator kinerja sasaran yang menjadi tolak ukur Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan adalah :

1. Meningkatnya layanan perpustakaan yang prima
2. Mewujudkan arsip yang dikelola sesuai dengan NSPK (Norma, Standar, Prinsip dan Kaedah)

Penetapan indicator ini melalui pemahaman visi Tabanan dan pendalaman Misi khususnya “Mewujudkan masyarakat Tabanan yang Aman dan Nyaman dalam pri kehidupan (Aman) dan Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)”

Capaian indicator kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan. Untuk detailnya tertuang dalam tabel 2.2



### 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Peprustakaan dan arsip kabupaten Tabanan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang perpustakaan dan arsip yang mempunyai kedudukan tugas pokok dan fungsi susunan dan organisasi dan tata kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan masih mengacu pada PERDA nomor 13 tahun 2016 dan PERBUP nomor 52 tahun 2016 di mana operasionalnya baru dimulai di awal tahun 2017. Dengan usia yang realtif sangat muda, sudah tentu banyak permasalahan dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Berikut merupakan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan :

- 1). Pelayanan public/pelayanan prima layanan perpustakaan dan kearsipan

Memberikan layanan kearsipan merupakan salah satu tupoksi yang diemban Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan untuk mewujudkan pelayanan public yang ideal diperlukan standar syarat ruang dan layanan dari Perpustakaan Nasional RI dan Arsip Nasional RI. Standar ini dipengaruhi oleh anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang lengkap. Namun kondisi saat ini sangat jauh dari standar ideal perpustakaan nasional RI dan Arsip Nasional RI. Adapun permasalahan yang dihadapi saat ini :

- a) Gedung perpustakaan umum masih bergabung dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip sehingga ruang staf, ruang koleksi dn ruang baca tidak dapat direalisasikan karena terbatasnya ruangan saat ini
- b) Kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan dimana setiap perpustakaan/kearsipan wajib memiliki sarana penyimpanan koleksi, sarana akses informasi dan sarana layanan perpustakaan dan kearsipan
- c) Kurangnya sumber daya manusia
- d) Keterbatasan anggaran yang tersedia

Dengan adanya permasalahan umum tersebut di atas akan menimbulkan masalah yang lebih spesifik yaitu :

- **Rendahnya minat baca masyarakat dan**
- **Rendahnya masyarakat sadar arsip**

#### 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan melaksanakan kegiatan teknis yang sering langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi lebih bersifat koordinatif dengan OPD baik vertikal maupun horisontal, sehingga dapat mengakomodir usulan masyarakat baik langsung maupun melalui Forum Musrenbang terkait dengan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan

Tabel 2.3  
Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2022  
Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tabanan	Tersedianya Dokumen SAKIP	3 Dok	
	Administrasi Keuangan Daerah	Kab. Tabanan	Persentase administrasi keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	90 %	
	Admiistrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tabanan	Persentase administrasi Umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tabanan	Persentase Sarana prasarana kantor dalam kondisi baik	60%	
	Penyediaan jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Kab. Tabanan	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerinth Daerah	Kab. Tabanan	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	
2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kab.	PROSENTASE PERPUSTAKAAN YANG PRIMA	25%	

	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tabanan	Persentase Perpustakaan yang dikelola dengan Baik	18 %	
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tabanan	Jumlah Pengunjung perpustakaan	5.000 orang	
3	PROGRAM PENGELOLAAN KEARSIPAN	KAB. TABANAN	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH, SWASTA, BUMD DAN DESA YANG TELAH MENGELOLA ARSIP SESUAI NSPK	20%	
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Tabanan	Jumlah OPD, Desa, BUMD, Swasta dan Ormas yang di bina	10%	
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tabanan	Persentase Dokumen / Arsip Daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	20%	
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Tabanan	Presentase Asip yang di Infut melalui Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	25%	
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Kab. Tabanan	PRESENTASE ARSIP YANG DAPAT DISELAMATKAN	20%	
	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Kab. Tabanan	Jumlah Arsip OPD yang di data dan dimusnahkan	10 opd	
	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Kab. Tabanan	Persentase Arsip akibat bencana yang dapat diselamatkan	5%	
	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Kab. Tabanan	Persentase Arsip yang dapat diselamatkan akibat Penggabungan dan Pemekaran	100%	
	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Kab. Tabanan	Persentase Arsip yang Di alih mediakan	-	
	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Kab. Tabanan	Persentase Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	100%	

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1.1 **Telahaan Kebijakan Nasional dan Provinsi Telahaan Kebijakan**

Telahaan kebijakan Nasional di Bidang Perpustakaan tertuang dalam:

##### **Visi**

“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui penguatan budaya literasi”.

##### **Misi**

Misi Perpustakaan Nasional disesuaikan dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu agenda ke-4 revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Maka Perpustakaan Nasional merumuskan Misi:

“Meningkatkan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan , Pelayanan Prima Perpustakaan, dan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Nusantara”.

##### **Tujuan Pembangunan Perpustakaan Nasional**

Upaya mewujudkan agenda pembangunan Nasional maka tujuan pembangunan Perpustakaan Nasional Tahun 2020 - 2024 dalam rangka mewujudkan misi adalah:

“Penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas dengan pemanfaatan perpustakaan bagi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat, ditandai dengan meningkatnya nilai budaya literasi dari 55,03 (Baseline 2019) menjadi 71,0 tahun 2024”

##### **Sasaran Strategis Perpustakaan Nasional**

Sasaran Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 diformulasikan dari misi dan tujuan yaitu kondisi yang ingin dicapai dan diwujudkan oleh Perpustakaan Nasional sebagai outcome atau dampak, yaitu:



“Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan literasi dan kegemaran membaca” dengan indikator:

- Nilai kegemaran membaca dari 53.84 (Baseline 2019) menjadi 71,30 tahun 2024.
- Indeks pembangunan literasi masyarakat dari 10,2 (Baseline 2019) menjadi 15,00 tahun 2024.

Sementara Telaahan Nasional Kebijakan di Bidang Kearsipan (ANRI) Arsip Nasional Republik Indonesia tertuang dalam

### **Visi**

Menjadikan Arsip Nasional Republik Indonesia yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melakukan pelayanan tugas-tugas Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

### **Misi**

Arsip Nasional Republik Indonesia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.” dan “Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”, dengan uraian sebagai berikut:

1. memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan;
2. memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi;
3. memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah;
4. melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
5. Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Pewujudan visi melalui pelaksanaan misi ANRI di atas hanya dapat terlaksana secara optimal apabila seluruh insan kearsipan menerapkan nilai-nilai organisasi ANRI yang terdiri atas :

1. Integritas;
2. Profesional;
3. Visioner;
4. Sinergi;
5. Akuntabel

### **Tujuan ANRI**

Meningkatnya pemanfaatan arsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan ketahanan budaya bangsa yang tangguh dengan indikator Indeks Pemanfaatan Arsip. Indeks Pemanfaatan Arsip mengukur tingkat pemanfaatan arsip dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan kebudayaan. Indeks bersifat komposit yang terdiri atas dimensi; (a) kepatuhan terhadap kebijakan pemanfaatan arsip, (b) penyediaan arsip untuk pemanfaatan arsip, (c) pelayanan informasi kearsipan.

### **Sasaran Strategis ANRI**

1. Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan dengan indikator Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan. Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan mengukur tingkat kepatuhan penyelenggara negara dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan bidang kearsipan. Indeks bersifat komposit terdiri atas dimensi; (a) kebijakan kearsipan, (b) kapabilitas penyelenggara kearsipan, (c) pelayanan dan fasilitasi kearsipan, (d) akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan.
2. Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional” dengan indikator Indeks Ketersediaan Arsip. Indeks Ketersediaan Arsip mengukur tingkat ketersediaan arsip di unit pengolah, unit kearsipan, dan lembaga kearsipan. Indeks bersifat komposit terdiri atas dimensi; (a) penciptaan dan akuisisi arsip, (b) penataan dan pengolahan arsip, (c) preservasi arsip.
3. Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima” dengan indikator Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan. Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan tingkat kualitas pelayanan informasi kearsipan yang dilaksanakan oleh unit kearsipan dan lembaga kearsipan. Indeks bersifat komposit terdiri atas dimensi; (a) pelayanan penggunaan dan pemanfaatan arsip, (b) penyelenggaraan sistem

dan jaringan informasi kearsipan, (c) pengelolaan data dan informasi kearsipan.

Ketiga indeks di atas, yaitu indeks kepatuhan terhadap kebijakan kearsipan, indeks ketersediaan arsip, dan indeks pelayanan informasi kearsipan untuk selanjutnya menjadi indeks yang bersifat terpadu dalam pengukuran tingkat kematangan atau kinerja kearsipan K/L/D.

4. Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI” dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah pusat dan daerah.

#### Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi nasional di bidang kearsipan dirumuskan atas dasar urgensi kearsipan bagi pembangunan bangsa dan negara. Setidaknya terdapat 3 (tiga) alasan pokok perlunya kearsipan dalam pembangunan nasional, yaitu:

##### 1. Kebutuhan Praktis Administrasi dan Manajemen

Dalam konteks pemenuhan kebutuhan praktis administrasi dan manajemen nasional, pembangunan kearsipan diarahkan untuk dapat:

- a. menjamin tersedianya arsip yang reliabel, autentik, lengkap dan dapat digunakan sepanjang dibutuhkan, melalui proses pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sistem kearsipan nasional;
- b. menyediakan sistem kearsipan yang andal baik untuk arsip analog maupun digital yang digunakan oleh K/L/D;
- c. membantu K/L/D dalam mengelola arsip untuk kepentingan pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian, pemeriksaan, proteksi/mitigasi/sengketa hukum, dan kebutuhan lainnya.

##### 2. Kebutuhan Kesenambungan Ilmu Pengetahuan

Dalam konteks pemenuhan kebutuhan menjaga kesinambungan ilmu pengetahuan, pembangunan kearsipan diarahkan untuk dapat:

- a. Menjamin arsip hasil kinerja K/L/D dan hasil pengkajian, penelitian, dan pengembangan dapat terkelola dan tersedia dalam mekanisme yang ideal untuk proses manajemen pengetahuan di K/L/D;
  - b. Menjaga kesinambungan ilmu pengetahuan dari generasi ke generasi;
  - c. Menjamin terwujudnya pusat referensi dan rujukan nasional untuk memperpanjang ingatan masyarakat dan mencegah munculnya gejala bangsa pelupa.
3. Kebutuhan Pemajuan Kebudayaan
- Dalam konteks pemenuhan kebutuhan pemajuan kebudayaan, pembangunan kearsipan diarahkan untuk dapat:
- a. Menyelamatkan dan melestarikan arsip sebagai memori kolektif, jati diri dan identitas bangsa, serta menjaga arsip untuk kepentingan keberadaan dan keutuhan wilayah NKRI;
  - b. Mendiseminasikan informasi arsip kepada masyarakat agar memiliki rasa sejarah dan budaya Indonesia;
  - c. Mempersiapkan arsip sebagai bahan dan sumber diplomasi internasional di bidang budaya

### **3.1.2 Telahaan Kebijakan Provinsi**

#### **Visi**

"Nangun Sat Kerti Loka Bali"

Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana

"Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945."

## MISI

1. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bali.
2. Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani.
3. Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data base riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan.
4. Memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun.
5. Mengembangkan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Pasraman di Desa Pakraman/Desa Adat.
6. Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali.
7. Mengembangkan sistem jaminan sosial secara komprehensif dan terintegrasi bagi kehidupan Krama Bali sejak mulai kelahiran, tumbuh dan berkembang sampai akhir masa kehidupannya.
8. Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri.
9. Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang komprehensif, mudah dijangkau, bermutu, dan terintegrasi bagi Krama Bali yang bekerja di dalam dan di luar negeri.
10. Memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan dan

pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Krama Bali.

11. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali secara sakala dan niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.
12. Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/ Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.
13. Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar kabupaten/kota se-Bali.
14. Meningkatkan promosi pariwisata Bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi antar kabupaten/kota se-Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreatifitas baru.
15. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.
16. Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi kabupaten/kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas.
17. Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (branding Bali) untuk memperkuat perekonomian Krama Bali.
18. Meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) secara terintegrasi serta konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali.
19. Mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan Krama Bali serta keamanan para wisatawan.
20. Mewujudkan kehidupan Krama Bali yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali.

21. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah, dan lingkungan yang, hijau, indah, dan bersih.
22. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.

## URUSAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN MENDUKUNG MISI KE-22

MENGEMBANGKAN SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN  
DAERAH YANG EFEKTIF EFISIEN, TERBUKA, TRANSPARAN,  
AKUNTABEL DAN BERSIH SERTA MENINGKATKAN PELAYAN  
PUBLIK TERPADU YANG CEPAT, PASTI DAN MURAH

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi kepala daerah, yaitu apa yang akan dicapai untuk kurun waktu 5 tahun ke depan, dari lima (5) misi yang diuraikan diatas Dinas Perpustakaan dan Arsip masuk didalam Misi 5 (lima), Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Misi 5 (lima) Memperkuat birokrasi yang berorientasi kinerja, transparan dan berdaya saing berbasis teknologi informasi, Berdasarkan RKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2022.

Melalui tema tersebut Program Prioritas Kabupaten Tabanan Tahun 2022 akan diarahkan pada :

1. Pendidikan  
Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan.
2. Kesehatan  
Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan  
Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya perlindungan sosial masyarakat, menciptakan rasa aman masyarakat, kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum, menurunnya angka kriminalitas serta peningkatan kualitas generasi milenial.

#### 4. Pertanian

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian, perikanan dan peternakan, meningkatnya kemampuan petani, nelayan dan peternak dalam mengelola sumber daya alam secara lestari dan meningkatnya produktifitas dan pendapatan petani.

#### 5. Budaya dan industry Pariwisata

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya daerah, meningkatnya kunjungan wisata ke obyek wisata, daya tarik wisata dan desa wisata.

#### 6. Lingkungan Hidup

Sasaran yang hendak dicapai adalah membaiknya system pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi terciptanya keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup

#### 7. Infrastruktur

Sebagai pendukung 6 (enam) bidang prioritas, memiliki target mewujudkan infrastruktur wilayah sebagai pendukung pencapaian enam bidang prioritas. Target ini bertujuan untuk mewujudkan bangunan gedung pemerintah yang layak pakai, sarana/prasarana transportasi yang memadai, kondisi perumahan/permukiman yang sehat, dan mewujudkan optimalisasi jaringan irigasi / sumber daya air.

Dari misi dan program prioritas tersebut tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Perpustakaan dan Arsip dapat dilihat seperti tabel berikut :





			Pelayanan Perpustakaan umum yang berbasis Teknologi Informasi (IT), Penyelamatan dan Pelestarian Bahan Pustaka, Peningkatan kapasitas SDM Perpustakaan Binaan.	Pelayanan Perpustakaan umum yang berbasis Teknologi Informasi (IT), Penyelamatan dan Pelestarian Bahan Pustaka, Peningkatan kapasitas SDM Perpustakaan Binaan.	Pelayanan Perpustakaan umum yang berbasis Teknologi Informasi (IT), Penyelamatan dan Pelestarian Bahan Pustaka, Peningkatan kapasitas SDM Perpustakaan Binaan.	Pelayanan Perpustakaan umum yang berbasis Teknologi Informasi (IT), Penyelamatan dan Pelestarian Bahan Pustaka, Peningkatan kapasitas SDM Perpustakaan Binaan.	Pelayanan Perpustakaan umum yang berbasis Teknologi Informasi (IT), Penyelamatan dan Pelestarian Bahan Pustaka, Peningkatan kapasitas SDM Perpustakaan Binaan.	Pelayanan Perpustakaan umum yang berbasis Teknologi Informasi (IT), Penyelamatan dan Pelestarian Bahan Pustaka, Peningkatan kapasitas SDM Perpustakaan Binaan.
Tujuan : Mewujudkan Masyarakat Sadar Arsip	Persentase Unit Kearsipan yang telah mengelola Arsip	Meningkatkan pengelolaan kearsipan pada Unit Kearsipan	Mendorong pengelolaan arsip sesuai NSPK pada Unit Kearsipan	Mendorong pengelolaan arsip sesuai NSPK pada Unit Kearsipan	Mendorong pengelolaan arsip sesuai NSPK pada Unit Kearsipan	Mendorong pengelolaan arsip sesuai NSPK pada Unit Kearsipan	Mendorong pengelolaan arsip sesuai NSPK pada Unit Kearsipan	Mendorong pengelolaan arsip sesuai NSPK pada Unit Kearsipan
Sasaran : Mewujudkan Arsip yang dikelola sesuai dengan NSPK (Norma, Standar, Prinsip dan Kaedah)	Nilai Audit Arsip	Mewujudkan Pengelolaan Arsip sesuai NSPK	Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah, Peningkatan kualitas SDM Tenaga Pengelola ke	Peningkatan Pelayanan kearsipan berbasis Teknologi Informasi (IT), Penyelamatan dan Pelestarian	Pembangunan Depo Arsip dan prasarananya, Peningkatan Pelayanan kearsipan berbasis Teknologi	Pembangunan Depo Arsip dan prasarananya, Peningkatan Pelayanan kearsipan berbasis Teknologi	Pembangunan Depo Arsip dan prasarananya, Peningkatan Pelayanan kearsipan berbasis Teknologi	Pembangunan Depo Arsip dan prasarananya, Peningkatan Pelayanan kearsipan berbasis Teknologi

			Arsipan OPD dan Pemerintahan Desa, LSM, Ornas BUMD, BUMN dan Swasta	Arsip Daerah, Peningkatan kualitas SDM Tenaga Pengelola ke Arsipan OPD, Pemerintahan Desa, LSM, Ornas BUMD, BUMN dan Swasta	Informasi (IT), Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah, Peningkatan kualitas SDM Tenaga Pengelola ke Arsipan OPD, Pemerintahan Desa, LSM, Ornas BUMD, BUMN dan Swasta	Informasi (IT), Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah, Peningkatan kualitas SDM Tenaga Pengelola kearsipan OPD, Pemerintahan Desa, LSM, Ornas BUMD, BUMN dan Swasta	Informasi (IT), Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah, Peningkatan kualitas SDM Tenaga Pengelola ke Arsipan OPD, Pemerintahan Desa, LSM, Ornas BUMD, BUMN dan Swasta	Informasi (IT), Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah, Peningkatan kualitas SDM Tenaga Pengelola ke Arsipan OPD, Pemerintahan Desa, LSM, Ornas BUMD, BUMN dan Swasta
--	--	--	---	---	--	---	--	--

Untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan memperhatikan sumber dana yang dimiliki serta lingkungan yang dihadapi. Strategi ini dimaksud untuk memberikan arah, dorongan dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan organisasi.

Beranjak dari tujuan dan sasaran di atas, maka disusun strategi di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan, sebagai berikut :

1. Peningkatan budaya gemar membaca
  - Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat guna mewujudkan masyarakat gemar membaca kearah kebiasaan membaca.
  - Meningkatkan kualitas dan kapasitas perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat.
  - Meningkatkan intensitas dan diversifikasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi yang ditandai adanya perpustakaan digital.
  - Mengembangkan, mengelola dan mendayagunakan semua karya tulis, karya cetak dan karya rekam hasil karya intelektual masyarakat Kabupaten Tabanan yang ditandai oleh meningkatnya koleksi deposit dan terlaksananya pelestarian bahanperpustakaan
2. Peningkatan budaya sadar arsip
  - Meningkatkan penyelamatan, pelestarian dan pemanfaatan arsip. Hal ini meningkatkan kualitas arsip yang ada. Arsip yang berkualitas akan menjadi sumber informasi yang akurat.
  - Meningkatkan dan mengembangkan SDM, sistem dan kelembagaan kearsipan yang ikut meningkatkan kualitas pelayanan arsip.
  - Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan kearsipan, agar penataan arsip lebih baik pada setiap PD dilingkungan Pemerintah Kab. Tabanan. Penataan arsip yang baik akan memberi manfaat jangka panjang bagi pengelolaan administrasi PD.
3. Isu strategis reformasi birokrasi
 

Isu strategis pada reformasi birokrasi yaitu memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi termasuk menatalaksanakan fungsi pelayanan perpustakaan dan kearsipan serta pengembangan pelayanan umum berbasis aplikasi dan jaringan internet, agar informasi perpustakaan dan kearsipan dapat diakses secara online.

Hal ini pada akhirnya menjadi poin penting untuk mendorong proses pembangunan masyarakat di Kabupaten Tabanan.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan maka ditetapkanlah program dan kegiatan prioritas. Program dan kegiatan prioritas ini disusun melalui penyelarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) Kabupaten Tabanan tahun 2022.

Berdasarkan prioritas pembangunan serta sasaran prioritas yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2022 dan tugas serta kewenangan yang diberikan kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan, maka untuk tahun 2022 ditetapkanlah program dan kegiatan prioritas. Untuk mengetahui secara rinci mengenai program dan kegiatan prioritas di maksud dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Tabanan  
Dinas Perpustakaan dan Arsip

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2												
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BUKAN BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	23											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN											
2	23	01										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
2	23	01	2.0 1									
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
2	23	01	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	80 A	10.000.000		80 A	10.000.000
2	23	01	2.0 1	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	80 A	10.000,000		80 A	10.000.000
2	23	01	2.0 2									
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
2	23	01	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	1 Tahun	6.160.817.000 ,-		1 Tahun	6.200.000.000

2	23	01	2.0 2	0 2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan							
2	23	01	2.0 2	0 7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	1 Tahun	10,000,000			1 Tahun	12.000.000	
2	23	01	2.0 6			Administrasi Umum Perangkat Daerah									
2	23	01	2.0 6	0 1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	1 Tahun	3.500.000			1 Tahun	4.563.200	
2	23	01	2.0 2	0 3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	1 Tahun	6.000.000			1 Tahun	8.000.000	
2	23	01	2.0 2	0 4		Penyediaan Bahan Logistik kantor	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	1 Tahun	50.000.000			1 Tahun	60.000.000	
2	23	01	2.0 2	0 5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	1 Tahun	5.000.000,-			1 Tahun	6.000.000	
2	23	01	2.0 2	0 6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	1 Tahun	2.000.000,-			1 Tahun	2.000.000,-	

2	23	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	1 Tahun	50.000.000,-			1 Tahun	60.000.000
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	1 Tahun	150,000,000			1 Tahun	150.000.000
2	23	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	1 Tahun	10.000.000			1 Tahun	15.000.000
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	1 Tahun	150.000.000			1 Tahun	200.000.000
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	1 Tahun	3.500.000			1 Tahun	4.000.000
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	1 Tahun	85.000.000			1 Tahun	85.000.000
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	1 Tahun	521.000.000			1 Tahun	521.000.000
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								



2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	1 Tahun	50.000.000			1 Tahun	60.000.000
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	1 Tahun	25.000.000			1 Tahun	35.000.000
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN								
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Terkelolanya Layanan Perpustakaan dengan Baik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	1 Tahun	100.000.000`			1 Tahun	150.000.000
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya jumlah perpustakaan yang memenuhi standar nasional.	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	68%	50.000.000,-			70%	75.000.000
2	23	02	2.01	03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Bertambahnya jumlah koleksi ke khasan daerah	Kabupaten Tabanan	10%	30.000.000,-			15%	35.000.000,-
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/ Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Perpustakaan Sekolah dan Desa Yang di Bina	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	64%	50.000.000,-			65 %	75.000.000
2	23	02	2.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus	Persentase Perpustakaan Khusus	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua	60%	50.000.000			65%	75.000.000

					Tingkat Kabupaten/Kota	yang di bina	kelurahan							
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga Perpustakaan dan pustakawan yang mengikuti bintek.	Kabupaten Tabanan	50 orang	100.000.000			75 orang	150.000.000	
2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Buku referensi yang di adakan	Kabupaten Tabanan	50 buku	50.000.000,-			75 buku	75.000.000	
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Persentase Bahan Pustaka yang di beli	Kabupaten Tabanan	20%	100.000.000			30%	150.000.000	
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Persentase Bahan Pustaka dana Kondisi baik	Kabupaten Tabanan	60%	30.000.000,-			65%	35.000.000	
2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terdinya dokumen tentang Data informasi perpustakaan, Tenaga perpustakaan dan pustakawan	Kabupaten Tabanan	1 dokumen	50.000.000			1 dokumen	50.000.000	
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah Sosialisasi ke Sekolah & Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	64%	50.000.000			65%	55.000.000	
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan	Tersedianya sarana layanan perpustakaan di tempat umum	Kabupaten Tabanan	1 unit	500.000.000			1 unit	500.000.000	

					Daerah Kabupaten/Kota								
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang diberikan penghargaan		10 orang	25.000.000			15 orang	40.000.000
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah orang yang menerima manfaat Inklusi Sosial	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, semua kelurahan	100 orang	100.000.000			125 orang	125.000.000
2	23	02	2.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah duta baca yang mengikuti lomba	Kabupaten Tabanan	10 orang	25.000.000			15 orang	35.000.000



2	24	02	2.03			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota								
2	24	02	2.03	0 1		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	Tersedianya Sarana dan Jaringan Akses dan Layanan kearsipan	Kabupaten Tabanan	1 OPD	75.000.000,-			1 OPD	75.000.000
2	24	02	2.03	0 2		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Jumlah Pengelola Unit Kearsipan dan lembaga Kearsipan yang di bintek	Kabupaten Tabanan	100 orang	100.000.000			100 orang	100.000.000
2	24	03				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP								
2	24	03	2.01			Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun								
2	24	03	2.01	0 1		Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah OPD yang Arsipnya di nilai dan ditepkan untuk dimusnahkan	Kabupaten Tabanan	5 OPD	25.000.000			10 OPD	50.000.000
2	24	03	2.01	0 2		Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip OPD yang dimusnahkan	Kabupaten Tabanan	5 OPD	25.000.000			10 OPD	50.000.000
2	24	03	2.02			Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota								
2	24	03	2.02	0 1		Evakuasi dan identifikasi Arsip Bencana	Jumlah Arsip yang di Evakuasi dan identifikasi Arsip akibat Bencana	Kabupaten Tabanan	5%	25.000.000			5%	25.000.000

2	24	03	2.02	0 2	Pemulihan Arsip dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dapat dipulihkan akibat bencana	Kabupaten Tabanan	5%	50.000.000			5%	50.000.000
2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan								
2	24	03	2.03	0 1	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Arsip yang terdata, tersusun dan dimusnahkan akibat penggabungan perangkat daerah	Kabupaten Tabanan	2 OPD	25.000.000			2 OPD	25.000.000
2	24	03	2.03	0 2	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang terdata, tersusun dan dimusnahkan akibat Pembubaran Perangkat Daerah	Kabupaten Tabanan	1 OPD	15.000.000			1 OPD	20.000.000
2	24	03	2.03	0 3	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan								
2	2	24	03	2.0 4	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan								
2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota								
2	24	03	2.04	0 1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip								

2	24	03	2.04	0 2	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip								
2	24	03	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang								
2	24	03	2.05	0 1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Terdatanya Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Kabupaten Tabanan	2 Arsip	20.000.000			2 arsip	25.000.000
2	24	03	2.05	0 2	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah Arsip Statis yang di evaluasi dan ditetapkan sebagai hasil alih media yang dinyatakan hilang	Kabupaten Tabanan	2 Arsip	25.000.000			2 Arsip	30.000.000
2	24	03	2.05	0 3	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah daftar penetapan dan pengumuman arsip statis yang dinyatakan hilang	Kabupaten Tabanan	2 Arsip	25.000.000			2 Arsip	30.000.000

---

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

#### 4.1 Rencana Target Kinerja 2022

Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan pada Tahun 2022 Rencana Kinerja Tahunan disusun setiap tahun dimana RKT memuat informasi tentang :

- a. Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan;
- b. Cara mencapai tujuan dan sasaran berupakebijakan serta indikator kinerja kegiatan dan target capaiannya.

#### 4.2 Rencana Kerja Kegiatan Tahun 2022

Pencapaian Target Kinerja yang ditentukan di Tahun 2022 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan pemukiman Kabupaten Tabanan mencapai kinerja yang baik, sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Tabanan 2016 -2021. Detail program dan kegiatan yang direncanakan di tahun 2022 disampaikan pada tabel berikut :



Tabel IV.1

Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022		Renca Kerja Perubahan Tahun 2022	
		Target	Rp	Target	Rp
1	2	3		4	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PERSENTASE ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD</b>	<b>100 %</b>	<b>6.149.401.575</b>	<b>100 %</b>	<b>6.149.401.575</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja PD</b>	<b>2 dok</b>	<b>4.999.975</b>	<b>2 dok</b>	<b>4.999.975</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan PD	2 dok	2.999.975	2 dok	2.999.975
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya doumen Kinerja PD	1 dok	2.000.000	1 dok	2.000.000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan</b>	<b>WTP</b>	<b>5.645.901.000</b>	<b>WTP</b>	<b>5.645.901.000</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	1 Tahun	5.643.401.000	1 Tahun	5.643.401.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	1 Tahun	2.500.000	1 Tahun	2.500.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai LKjIP</b>	<b>80</b>	<b>57.908.300</b>	<b>80</b>	<b>78,972,200</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	1 Tahun	1.250.000	1 Tahun	1.250.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	1 Tahun	1.995.300	1 Tahun	1.995.300
Penyediaan Bahan Logistik kantor	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	1 Tahun	17.500.000	1 Tahun	21.635.900
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	1 Tahun	1.750.000	1 Tahun	1.750.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	1 Tahun	495.000	1 Tahun	495.000
Penyediaan Bahan/Material	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	1 Tahun	15.000.000	1 Tahun	15.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	1 Tahun	19.918.000	1 Tahun	36.846.000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Nilai LKjIP</b>	<b>80</b>	<b>408.144.000</b>	<b>80</b>	<b>408.144.000</b>
Penyediaan Jasa Surat menyurat	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	1 Tahun	2.500.000	1 Tahun	2.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	1 Tahun	65.000.000	1 Tahun	65.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	1 Tahun	340.644.000	1 Tahun	340.644.000

<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Nilai LkjIP</b>	<b>80</b>	<b>32.448.300</b>	<b>80</b>	<b>42,448,300</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	1 Tahun	19.998.300	1 Tahun	29.998.300
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	1 Tahun	12.450.000	1 Tahun	12.450.000
<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>PROSENTASE PERPUSTAKAAN YANG PRIMA</b>	<b>20 %</b>	<b>37.817.450</b>	<b>20 %</b>	<b>57,812,350</b>
<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase Perputakaan yang terkelola dengan baik</b>	<b>60 %</b>	<b>2.817.450</b>	<b>60 %</b>	<b>22,812,350</b>
Pengembangan dan Pemeliharaan LayananPerpustakaan Elektronik	Terkelolanya Lapayanan Perpustakaan dengan Baik	1 Tahun	0,-	1 Tahun	19.994.900
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Bertambahnya jumlah perpustakaan yang memenuhi standar	68%	2.817.450	68%	2.817.450
<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	5.000 orang	<b>35.000.000</b>	5.000 orang	<b>35.000.000</b>
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah Sosialisasi ke Sekolah & Desa	64%	20.000.000	64%	20.000.000
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah orang yang menerima manfaat inklusi social	100 orang	15.000.000	100 orang	15.000.000
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEARSIPAN</b>	<b>PERSENTASE PERANGKAT DAERAH, SWASTA, BUMD DAN DESA YANG TELAH MENGELOLA ARSIP SESUAI NSPK</b>	<b>20 %</b>	<b>31.000.000</b>	<b>20 %</b>	<b>31.000.000</b>
<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah OPD, Desa, BUMD, Swasta dan Ormas yang di bina</b>	<b>10%</b>	<b>6.000.000</b>	<b>10%</b>	<b>6.000.000</b>
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah OPD, Desa, BUMD, Swasta dan Ormas yang di bina	10%	3.000.000	10%	3.000.000
Pengawasan Asip Dinamis Kerenangan Kabupaten / Kota	Jumlah OPD, Desa, BUMD, Swasta dan Ormas yang di awasi	5 %	3.000.000	5 %	3.000.000
<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Dokumen / Arsip Daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	20 %	<b>25.000.000</b>	20 %	<b>25.000.000</b>

Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang terkumpul	60%	12.500.000	60%	12.500.000
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang di akuisisi dan di preservasi	50%	12.500.000	50%	12.500.000
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	<b>PRESENTASE ARSIP YANG DAPAT DISELAMATKAN</b>	<b>20 %</b>	<b>107.500.000</b>	<b>20 %</b>	<b>107.500.000</b>
<b>Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun</b>	<b>Jumlah Arsip OPD yang di data dan dimusnahkan</b>	<b>10 opd</b>	<b>25.000.000</b>	<b>10 opd</b>	<b>25.000.000</b>
Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah OPD yang Arsipnya di Nilai dan ditetapkan untuk di musnahkan	5 OPD	12.500.000	5 OPD	12.500.000
Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip OPD Yang di Musnahkan	5 OPD	12.500.000	5 OPD	12.500.000
<b>Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Arsip akibat bencana yang dapat diselamatkan</b>	<b>10%</b>	<b>27.500.000</b>	<b>10%</b>	<b>27.500.000</b>
Evakuasi dan identifikasi Arsip Bencana	Jumlah Arsip yang di evakuasi dan identifikasi Arsip Akibat bencana	5 %	12.500.000	5 %	12.500.000
Pemulihan Arsip dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dapat di pulihkan akibat bencana	5 %	15.000.000	5 %	15.000.000
<b>Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan</b>	<b>ersentase Arsip yang dapat diselamatkan akibat Penggabungan dan Pemekaran</b>	<b>100%</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>20.000.000</b>
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Arsip yang terdata, tersusun dan dimusnahkan akibat penggabungan perangkat daerah	2 OPD	12.500.000	2 OPD	12.500.000

Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang terdata, tersusun dan dimusnahkan akibat pembubaran perangkat daerah	1 OPD	7.500.000	1 OPD	7.500.000
<b>Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang</b>	Persentase Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	<b>100%</b>	<b>35.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>35.000.000</b>
Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Terdatanya Arsip Statis yang dinyatakan hilang	2 arsip	10.000.000	2 arsip	10.000.000
Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah Arsip Statis yang dievaluasi dan ditetapkan sebagai hasil alih media yang dinyatakan hilang	2 arsip	12.500.000	2 arsip	12.500.000
Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah daftar penetapan dan pengumuman arsip statis yang dinyatakan hilang	2 arsip	12.500.000	2 arsip	12.500.000
Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Terdatanya arsip statis yang dinyatakan hilang	2 arsip	20.000.000	2 arsip	20.000.000
Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah Arsip Statis yang dievaluasi dan ditetapkan sebagai hasil alih media yang dinyatakan hilang	2 Arsip	25.000.000	2 Arsip	25.000.000
Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Penetapan dan pengumuman arsip statis yang dinyatakan hilang	2 Arsip	25.000.000	2 Arsip	25.000.000

## BAB V PENUTUP

Perumusan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 ini merupakan bagian dalam upaya Pemerintah Daerah mempercepat peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Untuk itu, berangkat dari apa yang telah ditetapkan pada Tahun 2022, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan akan merumuskan tahapan Pencapaian sasaran Pembangunan dengan memanfaatkan semua potensi yang ada seperti :

1. Dukungan sumber daya manusia yang akan terus ditingkatkan
2. Pemanfaatan sumber dana Pemerintah secara maksimal dengan berbasis kebutuhan pelayanan masyarakat dalam Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
3. Membuat inovasi atau ide-ide kreatif dalam melanjutkan pembangunan di Daerah

Sebagai uraian akhir pada BAB penutup Perubahan Rencana Kerja DDinas Perpustakaan dn AArsip Kabupaten Tabanan Tahun 2022 ini disampaikan Kaedah-kaedah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya RENJA ini, maka :

1. Rencana kerja ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan perubahan anggaran (RKPA) dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun anggaran 2022
2. Semua pihak dan pemangku kepentingan *Stake Holder* yang berkaitan dengan pembangunan urusan bidang Perpustakaan dan Arsip terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022
3. RENJA ini akan dijadikan dasar pengukuran dan Evaluasi kinerja (LAKIP) tahun 2022

Pada akhir tahun anggaran 2022 dilakukan evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan yang meliputi Evaluasi terhadap pencapaian sasaran Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga tidak menutup kemungkinan apabila terdapat masukan dan perubahan yang konstruktif akan dilakukan penyempurnaan lebih lanjut.

Tabanan, 26 Agustus 2022

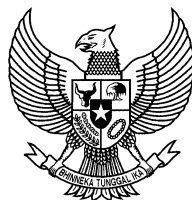
Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip  
Kabupaten Tabanan



**DEWA AYU SRI BUDIARTI, SE**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640422 198903 2 012



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 180/929/02/HK/2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2022

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022 telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Renja Perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik



- Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
  8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
  9. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 46);
  10. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 35);
  11. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 46);
  12. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu terdiri dari:

- a) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, disusun berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022.
- b) Sistematika Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a) disusun sebagai berikut :
  - Bab I. Pendahuluan
  - Bab II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan
  - Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
  - Bab IV. Penutup

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tabanan  
Pada tanggal 26 Agustus 2022

an. BUPATI TABANAN,  
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian  
Dan Pengembangan Kabupaten Tabanan



I Gede Urip Gunawan, S.Sos, M.Si.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197212111993021002

Tembusan keputusan ini, disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
2. Wakil Bupati Tabanan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
4. Inspektur Kabupaten Tabanan;
5. Kepala Badan/Dinas/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
6. Camat se-Kabupaten Tabanan;
7. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 180/929/02/HK/2022  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

SUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	<ol style="list-style-type: none"><li>1. DINAS PENDIDIKAN</li><li>2. DINAS KESEHATAN</li><li>3. BADAN RUMAH SAKIT UMUM</li><li>4. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN</li><li>5. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</li><li>6. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</li><li>7. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</li></ol>
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	<ol style="list-style-type: none"><li>1. DINAS TENAGA KERJA</li><li>2. DINAS KETAHANAN PANGAN</li><li>3. DINAS LINGKUNGAN HIDUP</li><li>4. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL</li><li>5. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</li><li>6. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</li><li>7. DINAS PERHUBUNGAN</li><li>8. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</li><li>9. DINAS KOPERASI DAN UKM</li><li>10. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU</li><li>11. DINAS KEBUDAYAAN</li><li>12. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP</li></ol>
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. DINAS PERIKANAN</li><li>2. DINAS PARIWISATA</li><li>3. DINAS PERTANIAN</li><li>4. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</li></ol>

- UNSUR PENDUKUNG  
URUSAN PEMERINTAHAN
1. SEKRETARIAT DAERAH
  2. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
- UNSUR PENUNJANG  
URUSAN PEMERINTAHAN
1. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
  2. BADAN KEUANGAN DAERAH
  3. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
- UNSUR PENGAWASAN  
URUSAN PEMERINTAHAN
1. INSPEKTORAT
- UNSUR KEWILAYAHAN
1. KECAMATAN KEDIRI
  2. KECAMATAN TABANAN
  3. KECAMATAN MARGA
  4. KECAMATAN BATURITI
  5. KECAMATAN PENEHEL
  6. KECAMATAN KERAMBITAN
  7. KECAMATAN SELEMADEG TIMUR
  8. KECAMATAN SELEMADEG
  9. KECAMATAN SELEMADEG BARAT
  10. KECAMATAN PUPUAN
- UNSUR PEMERINTAHAN  
UMUM
1. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

an. BUPATI TABANAN,  
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian  
Dan Pengembangan Kabupaten Tabanan



J. Gede Urip Gunawan, S.Sos, M.Si.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197212111993021002